

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DI KABUPATEN PELALAWAN**

Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau

**UIN SUSKA RIAU****OLEH :****HARYATI DEWINTA****NIM : 02270420558**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Haryati Dewinta

Nim : 02270420558

Program Studi : D3 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Pelalawan.

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Faiza Muklis, SE., M.Si
NIP. 19741108 200003 2 004

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi
D3 Akuntansi



Dr. Desrir Miftah, SE., MM., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

Dr. Hariza Hasyim, SE., M.Si
NIP. 19760910 200901 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : HARYATI DEWINTA
NIM : 02270420558
PROGRAM STUDI : D-III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI
JUDUL : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH (BPKAD) DI KABUPATEN
 PELALAWAN.
TANGGAL UJIAN : 04 JULI 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Sekretaris

Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M. Si
NIP. 19920925 201903 2 021

Penguji I

Andri Novius, S.E.,M.Si.,Ak.Ca
NIP. 19781125 200710 1 003

Penguji II

Hidayati Nasrah, S.E.,M.Acc,Ak
NIP. 19841229 201101 2 010



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Haryati Dewinta

NIM : 02270420558

Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Kerinci / 19 September 2004

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : D-III Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Pengeluaran

Kas Pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD)

di Kabupaten Pelalawan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



NIM : 02270420558

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh

HARYATI DEWINTA
NIM. 02270420558

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian sistem terhadap teori sistem informasi akuntansi, efektivitas implementasi SIPKD, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi langsung dari pihak BPKAD, serta data sekunder yang berasal dari jurnal dan karya ilmiah lainnya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan telah mengacu pada teori dasar sistem informasi akuntansi dan regulasi seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan UU No. 17 Tahun 2003. Meskipun demikian terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur jaringan, yang menghambat digilitasi penuh. Aplikasi SIPKD dinilai cukup efektif, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena masih adanya proses manual dan kurangnya pelatihan pegawai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM serta penguatan infrastruktur agar sistem informasi akuntansi dapat diimplementasikan secara lebih efisien dan akuntabel.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas, Pengeluaran kas, BPKAD.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis dan Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN ASET DAERAH (BPKAD) PELALAWAN”**. Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar besarnya beserta doa dan semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan juga tidak lupa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor

UIN SUSKA RIAU beserta Staf.

2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibu Dr. Hj. Hariza Hasyim, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi, yang telah memberikan pembekalan/motivasi kepada mahasiswa D-III Akuntansi.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.SI selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa sehingga penulisan Tugas Akhir dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Bapak dan Ibu dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Khusus nya D-III Akuntansi yang telah memberikan pengetahuan dan motivasi yang sangat berharga. Semoga Ilmu tersebut dapat diamalkan di kehidupan sehari – hari yaitu dunia kerja dan bermanfaat bagi orang lain.
6. Bapak Pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan Kas Daerah (BPKAD) di Kabupaten Pelalawan memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian.
7. Bapak Samsun, SE selaku Kabid Akuntansi dan Bina Keuangan serta pegawai-pegawai yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam menulis laporan penelitian ini.
8. Kepada keluarga tercinta dan terkasih penulis, yaitu Azhar nasution (Ayah), Desmiati (Mama), Muhammad al fajri (Adek), Rizky Ray Anasta (Adek) yang selalu memberikan arahan, kritik, saran,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

bimbingan, kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.

9. Sahabat penulis, yaitu Dian Karisma, Mirna Afriani, Aulia Alvinesya dan Diva Nada Hafiza. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, yang selalu memberikan do'a, ilmu, semangat dan dukungan kepada penulis sehingga telah selesai dalam penulisan Tugas Akhir ini..
10. Seluruh teman-teman kelas D-III Akuntansi, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, saran, dan do'a selama penulisan maupun mengikuti perkuliahan.
11. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Penulis

Haryati Dewinta



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.7 Teknik Analisis Data.....	8
1.8 Sistemika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	10
2.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan	10
2.2 Visi, Misi BPKAD	10



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3	Struktur Organisasi BPKAD	11
2.4	Tugas pokok dan fungsi pengurus BPKAD Pelalawan.....	12
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....		30
3.1	Tinjauan Teori	30
3.2	Tinjauan Praktek	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPKAD Pelalawan	12
Gambar 3. 1 Flowchart Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas	44
Gambar 3. 2 Flowchart Sistem Informasi Pengeluaran Kas	47
Gambar 3. 3 Flowchart Penerimaan Kas Pada BPKAD Kabupaten pelalawan Tahun 2022-2024	54
Gambar 3. 4 Flowchart Pengeluaran Kas Pada BPKAD Kabupaten pelalawan Tahun 2022-2024	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Penerimaan Kas Pada BPKAD di Pelalawan 2022- 2024	56
Tabel 3. 2 Data Pengeluaran Kas Pada BPKAD di Pelalawan 2022-2024	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara	72
lampiran 2 Foto bersama bapak kabid akuntansi dan Bina Keuangan.....	73





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi (SI) adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau menjalankan suatu aktivitas bisnis atau organisasi. Sistem informasi melibatkan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi (Ardana & Lukman, 2016, p. 1). Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti orang dan perlengkapan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang handal dan dapat menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak yang membutuhkan, harus bebas dari kesalahan kesalahan, tidak bias, dan harus jelas maksud dan tujuannya. Untuk dapat menghasilkan informasi dengan karakteristik tersebut, data yang diproses dalam sistem informasi akuntansi harus data yang benar dan akurat agar menghasilkan informasi yang dapat dipercaya (Maknunah, 2015).

Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, database, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan organisasi. SIA dapat membantu organisasi dalam berbagai hal, seperti pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan aset, kewajiban, dan modal, pelaporan keuangan, pengukuran kinerja keuangan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat (Ardana & Lukman, 2016).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta diperjelas melalui pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

BPKAD memiliki unit kerja atau bidang yang bertanggung jawab untuk mengelola kas, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas sebagai bagian dari tugasnya mengelola keuangan daerah. Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kas ialah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Perubahan kas dipengaruhi oleh 2 aktivitas yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan lainnya. Penerimaan BPKAD pelalawan mencakup berbagai sumber pendapatan yang menjadi bagian anggaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan peraturan daerah kabupaten pelalawan Nomor 11 Tahun 2023, jenis pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan kas daerah antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB – P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB). Selain itu penerimaan kas daerah juga berasal dari redistribusi daerah, yang terdiri dari dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan asli pelalawan (PAD) Kabupaten pelalawan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp123.969.248.215,00. Selain PAD, penerimaan kas daerah juga berasal dari pendapatan transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pendapatan lainnya yang sah. Pengelolaan penerimaan kas daerah oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan bertujuan untuk memastikan aliran dana yang masuk dapat digunakan secara optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah yang ada.

Sedangkan Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah (Janis et al., 2015). BPKAD menggunakan sistem pengeluaran kas untuk memproses pembayaran berbagai kewajiban yang timbul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sistem pembelian. Pengeluaran kas merupakan belanja dan pembiayaan di bukukan secara berpasangan (double entry). Yang mencakup, pengadaan milik daerah, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan pembayaran utang.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi yang bermacam-macam dan rumit, sistem akuntansi pemerintah menggunakan **aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)** sebagai alat bantu mempermudah pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Sistem ini memungkinkan proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan secara integrasi. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan telah menerapkan SIPKD untuk mendukung pencacatan dan pelaporan keuangan daerah khususnya dalam hal pengelolaan kas. Namun demikian, implementasi sistem informasi akuntansi seperti SIPKD tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa penerapan sistem ini masih menghadapi beberapa kendala teknis dan non-teknis. Di antaranya adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara optimal, masih adanya pencatatan manual yang menyebabkan potensi duplikasi data dan kesalahan input, serta permasalahan infrastruktur seperti koneksi jaringan yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai.

Di sisi lain, keberhasilan sistem informasi akuntansi juga sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan teori dan konsep dasar yang telah dikembangkan oleh para ahli, seperti Riahi-Belkaoui dan James Hall, yang menekankan pentingnya integrasi antara input, proses, dan output dalam siklus informasi akuntansi. Sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan konsep tersebut berisiko menghasilkan informasi yang tidak akurat atau tidak relevan.

Lebih jauh lagi, sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah daerah juga harus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan **Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketidaksesuaian sistem dengan regulasi ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan menghambat proses audit serta pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk melakukan analisis terhadap sistem informasi akuntansi yang diterapkan di BPKAD Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem tersebut sesuai dengan teori sistem informasi akuntansi, menilai efektivitas implementasi aplikasi SIPKD, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi pemerintah yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis dalam rangka peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah daerah, serta mendukung tercapainya pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana Sistem Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Maka penulis tertarik mengambil judul **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PELALAWAN”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Masalah Utama dalam Penelitian ini adalah

1. Apakah Sistem informasi akuntansi yang diterapkan di BPKAD Kabupaten Pelalawan telah sesuai dengan konsep dasar sistem informasi akuntansi?
2. Sejauh mana efektivitas implementasi aplikasi SIKPD dalam menunjang proses pencacatan kas daerah?
3. Apakah sistem informasi akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi pemerintah yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada Latar Belakang dan rumusan masalah yang ada , Tujuan dari Kajian ini adalah

1. Menganalisis kesesuaian sistem informasi akuntansi yang diterapkan di BPKAD Kabupaten Pelalawan dengan teori-teori sistem informasi akuntansi
2. Mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi SIPKD dalam proses pencacatan kas daerah.
3. Menilai tingkat kesesuaian sistem informasi akuntansi dengan regulasi dan standar akuntansi dan standar pemerintahan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagi BPKAD

Dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem informasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah (BPKAD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan kontribusi pengembangan pada sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.

c) Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai gambaran penerapan ilmu akuntansi yang dapat di terapkan di BPKAD
2. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang topik analisa sistem informasi akuntansi

1.5 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terletak di jalan Sultan Syarif Harun, Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency, Riau 28654

b. Data dan sumber

Data yang digunakan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset (BPKAD) di Pelalawan yaitu :

1. Data Primer : Data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung oleh meneliti dengan melakukan pengumpulan informasi yaitu melalui wawancara, dokumentasi untuk menghitung penerimaan kas dan pengeluaran kas.
2. Data Sekunder : Data yang di peroleh dari BPKAD dalam bentuk struktur organisasi dan sejarah singkat.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu tipe komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Keefektifan wawancara ditentukan oleh sejauh mana informasi yang ingin dikumpulkan telah tercapai. Oleh karena itu agar informasi-informasi penting yang diinginkan dapat diperoleh dari pihak terwawancara, maka seorang pewawancara perlu membuat semacam pedoman wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan penting yang akan diajukan (Widiastuti et al., 2018). Kontak tatap muka langsung antara pencari informasi dan sumber informasi adalah salah satu karakteristik wawancara. Penelitian ini melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang relevan, mendalam, dan kualitatif tentang subjek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut dibutuhkan suatu tempat/lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut (Hasan, 2022).

1.7 Teknik Analisis Data

Dalam Menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gambar tentang suatu keadaan secara objektif menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya.



1.8 Sistemika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul yang sudah dipaparkan maka penulis membagi menjadi empat bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini meliputi gambaran instansi, sejarah singkat instansi struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan wewenang Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) .

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini meliputi pembahasan yang mendukung landasan teori dan praktek diantaranya Definisi sistem informasi akuntansi, sistem informasi penerimaan kas, sistem informasi pengeluaran kas, serta bab ini berisi tentang hasil observasi yang telah di analisa pada sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, berisi penyampaian kesimpulan atas hasil penelitian, saran dan masukan untuk Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta diperjelas melalui pasal 46 peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pelalawan BPKAD merupakan badan daerah dengan type A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Selanjutnya berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

2.2 Visi, Misi BPKAD

a. Visi

“ PELALAWAN MAJU 2026”

Visi tersebut terdiri dari 2 unsur utama yaitu PELALAWAN MAJU.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata MAJU terdiri dari beberapa akronim sebagai berikut:

1. Pelalawan Makmur
2. Pelalawan Adil
3. Pelalawan Jaya
4. Pelalawan Unggul

b. Misi

Adapun Misi dari BPKAD Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman. (Maju SDM).
2. Mewujudkan kemakmuran ekonomi di perkotaan dan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing. (Maju Ekonomi)
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap, dan berkelanjutan. (Maju Infrastruktur)
4. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri. (Maju Wisata & Budaya)
5. Mewujudkan Tata Kelola dan layanan Pemerintahan yang humanis (*Good Public Services*) berbasis data dan teknologi informasi (Maju pemerintahan)

2.3 Struktur Organisasi BPKAD

Setiap badan organisasi ataupun perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Struktur

© Hakip Subhan, 2024

State Islamic University of Sutarayarif Kasim Riau



Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

ic University of Sutar
ada
B
m
b
K
m
a.

- B**
m
b
K
m
a.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perencanaan anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, dan bidang pengelolaan barang milik daerah.

- b. Pelaksanaan kebijakan pada kesekretariatan, bidang perencanaan anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada kesekretariatan, bidang perencanaan anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi pada kesekretariatan, bidang perencanaan anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
- c. Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala BPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum.
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan.
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu asks/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip.

- k. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Anggaran

- a. Bidang anggaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penyusunan dan pengendalian anggaran.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

anggaran menyelenggarakan fungsi :

- c. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan.
- d. Koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD.
- e. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- f. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
- g. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan.
- h. Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah.
- i. Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan.
- j. Penyediaan anggaran kas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala BPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Subbidang penyusunan anggaran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- b. Menyusun anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD.
- d. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD.
- e. Memfasilitasi tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- f. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- g. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- h. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Subbidang pengendalian anggaran mempunyai tugas :

- a. Penyediaan anggaran kas.
- b. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
- e. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Perbendaharaan

- a. Bidang perbendaharaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengelolaan kas dan belanja daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
 - c. Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah.
 - d. Mengoordinasikan pemindah bukuan uang kas daerah.
 - e. Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah.
 - f. Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
 - g. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah.
 - h. Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D.
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP.
 - j. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.
 - l. Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- m. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ).
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan.
- o. Pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah.
- p. Pelaksanaan bimbingan teknis pemindah bukuan kas daerah.
- q. Pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Subbidang kas daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan kas daerah.
- b. Melaksanakan pemindah bukuan kas daerah.
- c. Mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah.
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi pemindah bukuan kas daerah.
- e. Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah.
- f. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah.
- g. Melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas.
- h. Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas.

- i. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah.
- j. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas.
- k. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah.
 - l. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik.
- m. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas.
- n. Melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.
- o. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D.
- p. Melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.
- q. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah.
- r. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
- s. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- t. Menyimpan uang daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- u. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah.
- v. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- w. Melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain.
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Subbidang belanja daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan).
- b. Mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan).
- c. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM.
- d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;.
- e. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;.
- f. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas.
- g. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- h. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan.
 - i. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD.
 - j. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ).
 - k. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja.
 - l. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah..
 - m. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan tugas terkait analisa data, pelaporan, akuntansi dan konsolidasi laporan keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - c. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - d. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - e. Pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- f. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD.
- g. Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- h. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan.
- i. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- j. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.
- k. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- l. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial.
- m. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.
- n. Pelaksanaan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- o. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- p. Penyusunan kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- q. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- r. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran.
- s. Penyusunan, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala BPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- b. Mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran anggaran kas daerah.
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- d. Melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD.
- e. Melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD.
- f. Melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD.
- g. Melakukan pemantauan atas posting penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD.
- h. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD, BLUD dan PPKD.
- i. Melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengeluaran berdasarkan laporan penerimaan SKPD, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan).

- j. Menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- k. Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial).
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas.
- b. Melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- c. Menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- d. Menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
- e. Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- f. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Penyusunan bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- h. Penyiapan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- k. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang akuntansi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Pengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- b. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah.
- f. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- g. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah.
- h. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.
- j. Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;.
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- l. Mengoordinasikan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah.
- m. Mengoordinasikan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah.
- o. Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah.
- p. Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala.
- q. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.
- r. Mengoordinasikan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
- s. Mengoordinasikan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
- t. Mengoordinasikan pelaksanaan sensus barang milik daerah secara berkala yaitu 5 tahun sekali.
- u. Mengoordinasikan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rangka pemindahtanganan barang milik daerah.

- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala BPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Subbidang perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan asset mempunyai tugas :

- a. Menyusun standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- c. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah.
- d. Meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- e. Menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- f. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- g. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- h. Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang aset sesuai dengan bidang tugasnya.



15. Subbidang Inventarisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD.
- b. Menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
- c. Menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
- d. Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi.
- e. Menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari kepala bidang aset sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang digunakan di BPKAD Pelalawan sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala teknis dan operasional yang perlu dibenahi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di pelalawan, maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Teori Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang digunakan telah mengacu pada teori-teori dasar sistem informasi akuntansi, baik dari segi input, proses, maupun output. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya terintegrasi secara digital karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

2. Efektivitas Implementasi Aplikasi SIPKD

Penggunaan aplikasi SIPKD terbukti membantu proses pencatatan kas daerah secara signifikan. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena masih terdapat proses manual, kurangnya pelatihan, serta kendala teknis seperti jaringan dan perangkat keras.

3. Kesesuaian dengan Regulasi Pemerintah

Sistem telah mengacu pada regulasi pemerintah, seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan UU No. 17 Tahun 2003. Namun, masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi prosedur dan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP), yang memerlukan peningkatan pembinaan dan pelatihan

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM, Diperlukan pelatihan dan pendampingan rutin bagi pegawai agar mampu mengoperasikan aplikasi SIPKD secara optimal dan mengurangi ketergantungan pada proses manual.
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi, Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas jaringan dan perangkat keras agar sistem dapat berjalan lebih lancar dan stabil.
3. Standardisasi dan Dokumentasi Prosedur, Perlu dilakukan penyusunan dan dokumentasi prosedur operasional standar (SOP) untuk seluruh proses sistem informasi akuntansi agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk memastikan seluruh modul keuangan tetap sesuai dengan kebutuhan operasional.
4. Evaluasi Berkala Sistem, Disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem informasi akuntansi dan melakukan pembaruan sesuai perkembangan teknologi dan peraturan pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Amri, K. (2024). *Instruksi untuk Naskah Jurnal Ekonomi Manajemen Teknologi (EMT) KITA. September 2016.*

Anggraini, P. N., & Medan, U. N. (2019). *Journal Economy And Currency Study (JECS) Volume 1, Issue 2, Juli 2019 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Serdang Bedagai. 1(2), 16–26.*

Ardana, I. C., & Lukman, H. (2016). *Sistem informasi akuntansi.* Mitra Wacana Media.

Arifin, N. Y., Borman, R. I., Ahmad, I., Tyas, S. S., Sulistiani, H., Hardiansyah, A., & Suri, G. P. (2022). *Analisa Perancangan Sistem Informasi.* Cendikia Mulia Mandiri.

Asyari, M. R. (2021). Sistem informasi arsip surat menyurat. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 3(1), 175–184.*

Diana, A., & Setiawati, L. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Terbaru.* Penerbit Andi.

Febriantoko, J. (2024). *Sistem Informasi Akuntansi.* Penerbit NEM.

Financial Accounting Standards Board. (2017). *Accounting Standards Codification: Conceptual Framework for Financial Reporting.* Financial Accounting Standards Board.

Hasan, H. (2022). Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer), 2(1), 23–30.*

James, A. H. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi.* Salemba Empat.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Janis, R. S., Sondakh, J., & Sabijono, H. (2015). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Jusmani, J., & Mursalin, M. (2020). Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengendalian Biaya Administrasi dan Umum. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(1), 43–54.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2002). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. John Wiley & Sons.
- Kurlaili, A. (2019). *MENGUNGKAP KONSEP AKUNTANSI DALAM PERSEPEKTIF SYARIAH ISLAM*. Universitas Wiraraja.
- Lase, F. M. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PT. Kebayoran Pharma Medan*. Universitas Medan Area.
- Maknunah, J. (2015). Analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada lembaga pendidikan. *Smatika Jurnal: STIKI Informatika Jurnal*, 5(02), 27–39.
- Mustoffa, A. F., Aviska, A., & Lindayasa, Y. P. K. (2022). Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Penerimaan Kas Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 2(2), 305–312. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v2i2.156>
- Nurhadi, N., & Devitra, J. (2022). Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Web Pada Koperasi Karyawan Bank Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 7(2), 274–286.
- Nurhayati, N., & Susanto, A. (2017). The influence of transformational leadership



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

on the success of accounting information systems implementation (Survey on national Zakat management institution of West Java). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12(17), 4534–4539.

Partogi, Y., & Pasaribu, A. (2021). Perancangan metode decision tree terhadap sistem perpustakaan STMIK Kuwera. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi (SINTEK)*, 1(2), 20–25.

Peraturan Perundang-undangan. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Pusat.

Peraturan Perundang-undangan. (2016). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Pemerintah Pusat.

Perda Pelalawan. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan*. Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Riahi, A., & Belkaoui. (2000). *Teori Akuntansi*. Salemba Empat.

Sari, O. D. S., & Hwihanus. (2023). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(2), 287–297.

Soufitri, F. (2023). *Konsep sistem informasi*. PT Inovasi Pratama Internasional.

Sriyono, Heriyanto, & Purnamasari, D. I. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Bagian Perencanaan Keuangan Dan Antisipasi Kejadian Force Majeur Pada Adamar Arista Manunggal Dan Komunitas Ngakustik*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Sudipa, I. G. I., & Lestari, E. A. P. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Penduduk Dusun (Studi Kasus : Dusun Tegal Kori Kaja Ubung). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, 5(2). <https://doi.org/10.36002/jutik.v5i2.782>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Andi Publisher.

Widiastuti, H., Koagouw, F. V. I. A., & Kalangi, J. S. (2018). Teknik wawancara dalam menggali informasi pada program talk show Mata Najwa episode tiga Trans 7. *Acta Diurna Komunikasi*, 7(2).





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1 Daftar Wawancara

1. Bagaimana Proses Penerimaan Kas di BPKAD di Pelalawan ?

Jawaban :

Melalui non tunai, setiap ada penerimaan baik berupa setoran penerimaan yang di dapat dari rekanan langsung ke di setor ke rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), setelah di setor ke RKUD di hari yang sama di proses oleh bendahara penerimaan. Dibukukan dan dicatat di aplikasi SIPD. Setiap penerimaan yang masuk di rekam atau di catat. Setelah di catat penerimaan kas di input transaksinya oleh bendahara penerimaan, dari penerimaan itu di validasi oleh PPKSKPD kemudian di autofikasi, disahkan dan setelah di sahkan akan masuk ke SPJ bendahara penerimaan. Dan akhirnya akan terbentuk buku kas (BKU penerimaan).

2. Apa saja sumber penerimaan kas di BPKAD di pelalawan ?

Jawaban :

Pada BPKAD di Pelalawan penerimaan kas di peroleh dari lain lain PAD, berupa pendapatan pengembalian, temua, kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Apa saja jenis pengeluaran kas di BPKAD di pelalawan ?

Jawaban :

Pada BPKAD di Pelalawan Jenis pengeluaran kas yang di dikeluarkan untuk terkait dengan belanja, seperti : belanja barang jasa, belanja modal, belanja pegawai, belanja hibah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bagaimana proses pengeluaran kas di BPKAD di Pelalawan ?

Jawaban :

Proses pengeluaran kas di BPKAD di pelalawan terkait dengan pengelauaran gaji. Bendahara penerimaan membuat tagihan kemudian di ajukan ke BUD, BUD melakukan pencairan, pencairan akan masuk ke rekening bendahara penerimaan, bendahara penerimaan akan menyalurkan atau men transfer ke masing-masing penerimaan ke rekening pegawai. Terkait untuk pengeluaran kas belanja modal, tagihan pihak ketiga yang masuk ke bendahara kemudian di proses pptk, dari pptk mengajukan pencairan ke bendahara penerimaan untuk membuat SPP, SPM. Setelah itu dimasukkan ke BUD untuk dijadikan SPP-LS dan tagihan tersebut BUD langsung mentransfer ke pihak ketiga.

5. Apa sistem informasi yang digunakan di BPKAD pelalawan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas ?

Jawaban :

Sistem informasi yang digunakan oleh BPKAD di Pelalawan adalah menggunakan SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Gambar 1
Foto bersama bapak kbid akuntansi dan Bina Keuangan

